

**DEMOKRASI DESA : ANALISIS HUBUNGAN KEKUASAAN BPD DAN
PEMERINTAH DESA DI SIKAPAT, BANYUMAS**
**(VILLAGE DEMOCRACY: ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN
THE POWER OF BPD AND VILLAGE GOVERNMENT IN SIKAPAT,
BANYUMAS)**

Oleh :

Bambang Suswanto, Solahuddin K., dan Syah Firdaus

Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNSOED

(Diterima : 26 Juni 2001, disetujui : 20 Agustus 2001)

ABSTRAK

Hadirnya Badan Perwakilan Desa (BPD), sebagai lembaga baru di desa, menimbulkan perubahan pada hubungan kekuasaan dalam Pemerintahan Desa. Situasi dan kondisi politik di tingkat daerah serta nasional dan hubungan badan legislatif dan eksekutif di tingkat nasional dan daerah berpengaruh hingga tingkat pedesaan. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang hubungan kekuasaan BPD dan Pemerintah Desa. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan hubungan kekuasaan BPD dan Pemerintah Desa serta untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat atau pendorong hubungan kekuasaan BPD dan Pemerintah Desa. Setelah dilakukan penelitian diketahui bahwa interaksi BPD dan Pemerintah Desa dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, ternyata tidak seimbang. Pemerintah Desa memegang kekuasaan yang lebih besar daripada BPD sebab berbagai langkah BPD yang tidak pro aktif dalam melaksanakan fungsinya. Faktor penghambat interaksi BPD dan Pemerintah Desa adalah lemahnya sumber daya manusia BPD dan Pemerintah Desa, masih rendahnya partisipasi para anggota BPD dalam menjalankan tugas, masih ada anggapan Kepala Desa bahwa pelaksanaan tugas pemerintah desa masih mengacu pada sistem lama (UU No. 5 Tahun 1979). Selanjutnya, partisipasi masyarakat terhadap BPD masih rendah dan honor atau gaji para anggota BPD masih rendah dan belum jelas, sehingga mempengaruhi kinerja anggota BPD.

Kata kunci : Eksekutif, Legislatif Desa

ABSTRACT

The presence of village representative body (BPD) as a new institution has caused some changes on power relationship in village government. Political condition and situation and relationship between executive and legislative bodies at national and regional levels could influence those at village level. The rationale encouraged the author to conduct a research on the relationship between the power of BPD and that of the village government. The research was aimed at describing the relationship between the power of BPD and that of village government and at finding out the factors that supported and hindered the relationship. The research found that the interaction between BPD and the village government was imbalanced. The village government had more power than the BPD as the latter did not take proactive steps in implementing its function. Some of the factors that inhibited the interaction between the BPD and the village government were the poor human resources both of the BPD and the village government, the low participation of BPD members in doing their duties. The head

village still considered that the implementation of village government should refer to the old system of UU (Act) No. 5/1979. The participation of the people in BPD and fees of BPD member were low and uncertain and it influenced their working morales.

Key words: Executive, village legislative

PENDAHULUAN

Dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia, undang-undang tentang otonomi daerah merupakan salah satu undang-undang yang sering mengalami perubahan dan pembaharuan. Sejak kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah memiliki undang-undang tentang otonomi daerah sebanyak delapan buah. Hal ini merupakan bukti bahwa selama ini bangsa Indonesia masih belum berhasil membuat undang-undang tentang otonomi daerah yang dapat mengikuti arus perubahan jaman sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari perjuangan bangsa Indonesia.

Seiring dengan perubahan yang terjadi dalam negara Indonesia, maka tidak mengherankan apabila pemerintahan baru dalam kabinet persatuan mengadakan gebrakan untuk melakukan pembaharuan guna mencapai keadaan yang lebih baik dari masa lalu. Salah satu gebrakan yang dilakukan oleh pemerintahan baru, di antaranya, adalah mengenai Undang-Undang Otonomi Daerah (UU NO. 22/1999).

Undang-undang baru tentang otonomi daerah yang dimaksud untuk memenuhi maraknya tuntutan reformasi dari segenap lapisan masyarakat Indonesia yang menghendaki perbaikan

dan pembaharuan dari segala tatanan yang telah rusak akibat penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dilakukan oleh pemerintahan rezim Orde Baru.

Berbagai perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan negara berpengaruh terhadap keserasian hubungan di antara lembaga tinggi negara, seperti hubungan eksekutif dan legislatif di tingkat nasional yang tidak harmonis pada saat ini. Hal ini terbukti banyaknya kasus yang muncul yang mencerminkan konflik antara DPR dengan Presiden. Menurut Zulvan Lindan, sebagian anggota DPR telah melihat beberapa pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR dan Undang-Undang oleh Presiden (Suara Merdeka 30 Nopember 2000).

Situasi ketidak-harmonisan hubungan eksekutif dan legislatif di tingkat nasional juga berpengaruh di tingkat daerah, khususnya dalam persiapan pelaksanaan Otonomi Daerah. Undang-Undang tersebut memberi keleluasan yang sangat besar kepada DPRD sehingga muncul arogansi wakil rakyat yang dapat mengganggu hubungan kemitraan DPRD dengan pemerintah di tingkat Kabupaten (Suara Merdeka 28 April 2000).

Posisi badan/lembaga legislatif di daerah, dengan adanya UU No. 22 tahun 1999 yang dalam pasal 18-20 mengenai Wewenang Anggota DPRD mengatakan bahwa mereka berhak minta keterangan kepada pejabat daerah dan masyarakat menjadi kuat. Ancaman pidana kurungan dikenakan terhadap mereka yang menolak permintaan (anggota) DPRD itu. Hal ini akan menimbulkan efek yang kurang baik karena dapat melahirkan arogansi para anggota DPRD yang nantinya dapat menjadikan hubungan lembaga eksekutif dengan legislatif di daerah kurang harmonis.

Dalam mempersiapkan pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Kabupaten Banyumas telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda), di antaranya Perda tentang pembentukan Badan Perwakilan Desa (Perda No. 3 tahun 2000). Selanjutnya perda ini juga sudah disosialisasikan; di setiap desa telah dibentuk BPD melalui pemilihan oleh anggota masyarakat. Dengan adanya lembaga baru di desa ini akan timbul berbagai perubahan dalam pemerintahan desa. Gerak roda pemerintahan desa akan diwarnai oleh aktivitas para anggota BPD karena fungsi BPD, sesuai Perda dengan tersebut adalah legislatif, adalah merumuskan dan menetapkan peraturan desa dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Kedudukan BPD di desa adalah sejajar dengan dan menjadi mitra Pemerintah Desa.

Dengan hadirnya BPD sebagai lembaga baru di desa, perlu diteliti mengenai hubungan kekuasaan Badan Perwakilan Desa itu dengan Pemerintah Desa, karena tidak ada jaminan bahwa jalannya pemerintahan desa akan sesuai dengan peraturan daerah yang sudah ditetapkan, walaupun Perda itu telah disosialisasikan. Di samping itu, situasi dan kondisi hubungan eksekutif dan legislatif di tingkat nasional dan daerah juga dapat mempengaruhi hubungan kedua lembaga itu pada tingkat desa. Hal itulah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang hubungan kekuasaan BPD dengan Pemerintah Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan strategi riset yang mengandalkan data deskriptif (Taylor dan Bodan, 1984, 5). Penelitian kualitatif sesuai untuk menganalisis data yang bersifat verbal dengan permasalahan penelitian ini. Selain itu, penelitian kualitatif dipandang cocok untuk proses penelitian yang mengikuti alur pikir induktif seperti menyederhanakan realitas dalam suatu bentuk model (Mas'ood, 1994, h. 78).

Analisis data menggunakan model analisis interaktif. Model ini mengikuti model Miles dan Huberman (1984), yaitu melalui proses sebagai berikut: Data yang sudah terkumpul direduksi atau disederhanakan menjadi beberapa pokok temuan penelitian

tentang fenomena penelitian. Kemudian temuan ini disajikan secara naratif. Reduksi data dan penyajian data adalah dua komponen analisis yang dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses berikutnya adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan setelah data disajikan, dideskripsikan, kemudian diberi makna dengan interpretasi secara logis yang didasarkan pada pendekatan fenomenologis (Taylor dan Bagdan, 1989). Dengan cara ini, sasaran analisis adalah memperoleh sejumlah pemahaman terhadap fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilaksanakan penelitian mengenai analisis hubungan kekuasaan Badan Perwakilan Desa dengan Pemerintah Desa di desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dapat dideskripsikan sebagai berikut :

Hubungan Kekuasaan Badan Perwakilan Desa dan Pemerintah Desa

Pada tahun 2000 di desa Sikapat dilakukan proses pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD). Mekanisme pemilihan mengikuti ketentuan yang tertuang pada Surat Keputusan Bupati Banyumas No. 45 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa. Dalam pembentukan BPD, yang pertama dilakukan adalah pembentukan panitia pemilihan yang terdiri dari perangkat desa dan tokoh masyarakat.

Kemudian panitia pemilihan melakukan penjangkaran bakal calon di setiap RT/RW sebanyak 2 (dua) orang. Untuk desa Sikapat calon dapat sejumlah 48 orang yang berasal dari 24 RT. Dari 48 orang calon kemudian oleh RT/RW dan Perangkat Desa dengan seleksi administratif dipilih sebanyak 26 calon. Selanjutnya ke-26 calon disosialisasikan kepada warga masyarakat guna memberitahukan kepada seluruh warga tentang para calon yang akan dipilih secara langsung dengan pemungutan suara. Dari hasil pemungutan suara terpilih sebanyak 13 orang untuk menjadi anggota BPD.

Kehadiran lembaga baru di desa yang berupa Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai DPR desa membawa pengaruh terhadap hubungan kekuasaan BPD dengan pemerintah desa. Hal ini terjadi setelah BPD mulai menjalankan fungsi dan tugasnya, dan memiliki persepsi yang berbeda dari pemerintah desa. Kepala Desa masih beranggapan bahwa kekuasaan yang mereka lakukan masih berdasar aturan lama, yaitu UU No. 5 Tahun 1979 yang menyatakan Kepala Desa, selain sebagai Kepala Pemerintahan Desa, juga merupakan Ketua Lembaga Musyawarah Desa (Pasal 17 ayat 2, UU No. 5 Tahun 1979).

Persepsi demikian nampak pada pembentukan bermacam peraturan desa yang dilakukan bersama dengan BPD, misalnya membuat struktur organisasi tata kerja pemerintahan desa (SOT) dan

peraturan tentang pungutan desa. Dalam menyusun kedua peraturan tersebut Kepala Desa berperan sangat dominan, sehingga BPD seolah-olah kurang berfungsi atau pasif. Selanjutnya, peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa dan BPD tidak disosialisasikan kepada masyarakat, tetapi kemudian langsung dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Hal ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat karena munculnya berbagai pungutan desa yang mereka anggap sangat memberatkan warga masyarakat desa.

Menurut BPD, dalam menjalankan fungsi sebagai DPR desa, badan itu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, keputusan, dan anggaran belanja desa. BPD menjalankan fungsi sesuai dengan Perda No. 3 Tahun 2000 dan UU No. 22 Tahun 1999. Dalam melakukan tugasnya, BPD lebih banyak melakukan penyelidikan dan pengawasan mengenai kasus penyimpangan Kepala Desa yang dilakukan sebelum lembaga BPD itu berdiri. Maka, dalam pelaksanaan di lapangan terjadi perbedaan persepsi antara pemerintah desa dengan BPD. Akibatnya, antara pemerintah desa dan BPD banyak terjadi konflik yang berkaitan dengan kekuasaan. Data di lapangan menunjukkan adanya konflik antara Kepala Desa Petir dengan BPD yang melakukan jajak pendapat untuk merekomendasikan penggantian Kepala Desa yang dianggap telah melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugasnya.

Di Kecamatan Sumbang, khususnya di desa Sikapat, kehadiran BPD secara umum tidak menimbulkan persoalan yang justru muncul di tingkat warga masyarakat, dengan adanya Otonomi Daerah, adalah konflik antara Pemerintah Desa dengan warga terutama mengenai kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah desa dengan BPD. Mereka terutama mempersoalkan adanya berbagai pungutan desa.

Sebetulnya, dalam hubungan kekuasaan pemerintah desa dengan BPD banyak terjadi ketidak-harmonisan dalam pelaksanaan tugas, karena sikap para anggota BPD di Sikapat yang lebih lunak atau menahan diri dalam membuat berbagai keputusan desa. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi konflik yang tidak diinginkan, terutama yang dapat menimbulkan perpecahan di antara warga. Sikap BPD yang lunak itu di mata warga masyarakat menimbulkan preseden yang kurang baik karena BPD dianggap pasif dalam merespon program-program yang diusulkan oleh pemerintah desa. Bahkan, secara ekstrim warga masyarakat menganggap bahwa di desa Sikapat sebelum ada BPD dan setelah ada BPD tidak ada perbedaan sama sekali. Dengan kata lain, kehadiran BPD bagi warga desa tidak ada manfaatnya.

Selanjutnya, BPD desa Sikapat dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa masih bersifat informal yaitu setiap anggota BPD secara individu/sendiri mengamati jalannya

pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya, karena secara umum para anggota masih banyak yang pasif tidak mempunyai inisiatif untuk melaksanakan tugasnya.

Dalam menjalankan pemerintahan desa, tidak terdapat antara perangkat desa dengan Kepala Desa, karena Kepala Desa lebih banyak berperan dan tidak ada pendelegasian tugas kepada para kaurnya. Seolah-olah Kepala Desa berjalan sendiri dengan melakukan berbagai tindakan yang mengakibatkan keresahan para perangkatnya. Sebagai misal, Kepala Desa mengusulkan kepada BPD untuk mengeluarkan perangkat desa yang tidak aktif. Tindakan seperti itu membuktikan bahwa Kepala Desa selaku pimpinan desa tidak dapat membina para perangkatnya, sehingga dalam pemerintahan desa terjadi ketimpangan. Hal ini adalah karena Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya berjalan sendiri tanpa mendapat dukungan dari perangkat desa.

Temuan di lapangan menyatakan bahwa hubungan kekuasaan Pemerintah Desa dengan BPD belum sesuai dengan yang tertera dalam Perda No. 3 Th 2000 yang menyebutkan hubungan BPD dengan Pemerintah Desa merupakan hubungan kemitraan atau sejajar. Akan tetapi, realita yang ada tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh UU No. 22 Th. 1999 tentang Otonomi Daerah. Yang terjadi adalah kekuasaan antara pemerintah desa dengan BPD tidak seimbang, maka terjadi saling

dominasi, sehingga menimbulkan ketidak-harmonisan antara kedua lembaga desa tersebut.

Berbagai Faktor yang Menjadi Penghambat Hubungan Kekuasaan Badan Perwakilan Desa dan Pemerintah Desa

Dalam UU No. 2 Tahun 1999 dan Perda Kabupaten Banyumas No. 3 disebutkan sifat hubungan BPD dengan Pemerintah Desa adalah hubungan kemitraan. Secara politis dapat dikatakan bahwa kedua aktor institusional ini mempunyai daya tawar yang seimbang atau sejajar dalam pembuatan kebijakan. Hubungan kemitraan ini didukung pula oleh basis legitimasi kedua lembaga itu yang sama-sama dipilih oleh rakyat. Dilihat dari proses legitimasinya, maka kedua baik BPD maupun Kepala Desa mempunyai kedudukan yang sama kuat.

Namun, realitas politis menunjukkan fenomena yang melenceng dari keharusan legalistik. Kenyataan empirik menunjukkan bahwa mekanisme *check and balances* tidak bisa berjalan karena Kades masih memegang kekuasaan yang lebih besar; keberadaan BPD belum dapat secara signifikan mempengaruhi atau menimbulkan perubahan performa administrasi dan politik Kepala Desa. Dalam konteks ini, performa pemerintahan desa masih terfokus pada figur Kepala Desa yang tetap dominan seperti ketika di bawah UU No. 5 Tahun 1979. Di bawah UU No. 5 Tahun 1979 Kepala Desa

menduduki jabatan rangkap sebagai Kepala Pemerintahan dan Pemimpin LMD yang diasumsikan sebagai lembaga legislatif. Dengan posisinya yang sangat kuat itu, secara tegas Kepala Desa dinyatakan sebagai penguasa tunggal di desa.

Faktor yang menjadi penghambat adalah : **Pertama**, rendahnya kualitas sumber daya manusia terutama tingkat pendidikan SDM kedua lembaga desa tersebut masih rendah. Hasil temuan di lapangan menggambarkan bahwa mayoritas anggota BPD hanya berpendidikan SLTP dan SD. Dari 13 orang anggota BPD, yang berpendidikan SLTA hanya 4 orang atau 31 persen, sedangkan yang 69 persen hanya tamatan SD dan SLTP. Sumber daya manusia pada pemerintah desa kebanyakan hanya tamat SD; dari 14 perangkat desa termasuk Kepala Desa, sejumlah 11 orang atau 78 persen hanya tamat SD. Selebihnya, sejumlah 4 orang atau 22 persen tamat SLTA. Keadaan ini menjadikan aktivitas BPD selama ini bertumpu pada 3 orang saja, yaitu: Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris BPD. Dalam banyak kasus yang terjadi dalam proses perumusan peraturan desa, sebagian besar anggota BPD hanya menyetujui apa yang menjadi kesepakatan 4 orang (3 dari BPD ditambah Kepala Desa). Kepasifan mayoritas itu menyebabkan tidak pernah terjadinya *voting* dalam menyikapi keputusan yang akan diambil.

Kedua, partisipasi para anggota BPD dalam menjalankan tugas masih

rendah. Sekalipun sosialisasi telah dilakukan oleh aparat Pemerintah Kabupaten dan DPRD, ternyata kebanyakan para anggota BPD masih belum memahami UU No. 22 Tahun 1999 dan Perda No. 3 tentang Lembaga BPD. Mereka tidak mengerti apa yang harus mereka perbuat sesuai dengan hak dan kewajiban anggota BPD. Persoalan rendahnya partisipasi berkaitan pula dengan budaya masyarakat setempat. Sekalipun gerakan reformasi merambah ke desa-desa, budaya *ewuh pekewuh* pada tokoh-tokoh yang berpengaruh masih kuat. Sebagian besar anggota BPD Sikapat bermata pencaharian sebagai petani pemilik tanah dan buruh, sedangkan 3 figur yang aktif berprofesi sebagai guru SD. Guru dipersepsi sebagai orang yang pandai, lebih mengerti tentang persoalan yang mereka hadapi. Guru dalam pandangan masyarakat tradisional harus "digugu dan ditiru", sebab itu mereka adalah figur panutan masyarakat. Petani sekalipun tidaklah harus selalu menerima apa adanya, dan dapat memberi tanggapan secara keras terhadap penetrasi, bahkan mampu bertindak revolusioner (Sartono Kartodirdjo, 1984, h.89), namun tetap bertumpu pada budaya tunduk terhadap pimpinan. Kenyataan sejarah, seperti peristiwa tersebut menunjukkan bahwa perilaku petani tergantung pada karakter pemimpinnya.

Ketiga, pemerintah desa, dalam hal ini Kepala Desa, masih beranggapan

bahwa pelaksanaan tugas pemerintah desa masih berdasar pada kebiasaan lama yaitu mengacu pada UU No. 5 Th. 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang menyatakan Kepala Desa memiliki kekuasaan yang lebih besar dibanding lembaga lain di desa. Dalam perdebatan yang muncul antara BPD dan Kepala Desa ketika membahas peraturan tentang pungutan desa, sang Kepala Desa menyatakan "*Aku dipilih kapan ? Kowe dipilih kapan*", merupakan alasan irrasional untuk meminggirkan BPD dengan mengeksploitasi waktu pemilihan Kepala desa dengan Anggota BPD yang berbeda. Kepala Desa dipilih dan disahkan ketika UU No. 22 belum berlaku, sedangkan BPD dipilih ketika UU No. 22 sudah diberlakukan. Dalam persepsi Kades, karena dia terpilih lebih awal dibanding BPD ketika UU lama masih berlaku, maka adalah konstitusional jika Kades memiliki posisi dominan dalam pemerintahan. Dalam hal ini, sekalipun mempunyai persepsi yang berbeda dengan Kades, anggota BPD nampaknya tidak mengambil sikap tegas, yaitu dengan "menggantung" pengesahan Perdes tersebut. Namun, unikny mereka juga kurang responsif terhadap tindakan Kades yang telah melakukan berbagai pungutan. Sekalipun demikian, khusus untuk pungutan terhadap industri peternakan, BPD akan melakukan penolakan terhadap Kades. Alasan penolakan itu adalah sekedar kekhawatiran bahwa pungutan yang dianggap terlalu besar justru akan

menutup kemungkinan perusahaan peternakan untuk berkembang yang, tentunya, diikuti dengan pengangguran para pekerjanya yang sebagian besar adalah warga Sikapat.

Keempat, masyarakat desa pada umumnya kurang berpartisipasi secara terbuka terhadap lembaga BPD sebagai badan legislatif desa. Sekalipun muncul persoalan sekitar banyaknya pungutan, masyarakat tidak menyatakan hal tersebut kepada BPD. Nampaknya mereka masih belum memahami tugas dan fungsi BPD yang sudah berbeda dengan LMD di masa lalu. Pasifnya kontrol masyarakat terhadap BPD menimbulkan kesan bahwa munculnya BPD tidak lebih seperti berbagai lembaga desa yang pernah ada, yaitu hanya merupakan lembaga *subordinasi* pemerintah dan, karena itu, tidak ada manfaatnya bagi masyarakat desa. Kepasifan masyarakat memungkinkan munculnya koalisi kekuatan antara elemen intra BPD dan Kades guna memanipulasi berbagai bentuk pungutan.

Kelima, secara finansial honor/gaji anggota BPD masih rendah dan belum jelas, sehingga mempengaruhi kinerja anggota BPD. Dalam Perda No. 3 pasal 23 disebutkan bahwa biaya keperluan anggota BPD ditetapkan sebesar 10 persen dari anggaran pendapatan dan belanja rutin desa. Dengan mengacu peraturan tersebut pada desa yang miskin imbalan bagi para anggota BPD kurang menarik, sehingga mengakibatkan para anggota BPD bersifat

pasif dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

KESIMPULAN

Berdasar uraian di atas, penelitian ini menyimpulkan :

1. Sekalipun BPD dan Pemerintah Desa Sikapat memperoleh dasar legitimasi yang sama dari masyarakat, ternyata mekanisme *check and balances* antara BPD dan Pemerintah Desa Sikapat, tidak bisa berjalan secara efektif. Hal itu ditunjukkan dengan kurang optimumnya pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap Pemerintah Desa. Dalam konteks hubungan kekuasaan tersebut, Pemerintah Desa lebih berpengaruh terhadap BPD daripada sebaliknya. Akibat-

nya, hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum dapat diwujudkan.

2. Faktor yang diinterpretasikan menghambat perwujudan *check and balances* secara ideal dalam konteks hubungan kekuasaan BPD dan Pemerintah Desa Sikapat adalah :
 - (a) Pendidikan sebagian besar anggota BPD yang masih rendah;
 - (b) Kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap eksistensi institusinya;
 - (c) Adanya perbedaan persepsi Pemerintah Desa dan BPD terhadap pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999;
 - (d) Kurangnya motivasi anggota BPD untuk memperbaiki kinerjanya karena honor/gaji yang sangat rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Curtis, M. *Comparative Governanent and Politics*. Harper & Row, New York, USA.
- Faisal Basri. 1999. *Otonomi Daerah untuk Mengokohkan Indonesia sebagai Negara Bangsa*. Jurnal Otonomi, Jakarta.
- Fadilah Putra. 1999. *Devolusi, Politik Desentralisasi sebagai Media Rekonsiliasi Ketegangan Politik Negara dan Rakyat*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gafar, A. 1992. *Pemilu 1992 : Merebutkan Jatah 25% Suara yang Tersisa*. Makalah dipresentasikan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan, UGM, Yogyakarta.
- Kowara, E. 2000. *Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999*. CSIS, Jakarta.
- Mas'oed, M. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. LP3ES, Jakarta.
- Maschab, M. 1983. *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. PT Bina Aksara, Jakarta.
- Nihin, D.J. 1999. *Paradigma Baru Pemerintahan Daerah Menyongsong Millenium Ketiga*. Mardi Mulyo, Palangkaraya.

- Miles dan Huberman. 1984. *Analisis Data Kualitatif*. Gramedia Jakarta.
- Kartodirdjo, S. 1984. *Pembrontakan Petani Banten 1888*. Pustaka Jaya, Jakarta.
- Sanit, A. 1985. *Perwakilan Politik di Indonesia*. CV Rajawali, Jakarta.
- Soebiantoro. 1996. *Perkembangan Demokrasi di Indonesia : Analisis Hubungan Legislatif dan Eksekutif 1950-1992*. "Tesis", Program Pasca-sarjana, UGM, Yogyakarta.
- Setiawan, A. 1998. *Perilaku Birokrasi Dalam Pengaruh Paham Kekuasaan Jawa*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suyanto, I. 1989. *Perkembangan Peranan DPR RI : Suatu Tinjauan Budaya Politik*. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional II Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Yogyakarta.
- Suny, I. 1986. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Aksara Baru, Jakarta.
- Surbakti, R. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. PT Gramedia, Jakarta.
- Suhartono. 2000. *Parlemen Desa, Dinamika DPR Kelurahan dan DPRK Gotong Royong*. Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Suara Merdeka, 28 April 2000 dan 30 Nopember 2000.
- Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Banyumas No. 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa.